

# STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGROMARIN DI PULAU LOMBOK

## *Policy Strategies in Developing Agromarine in Lombok*

**Anas Zaini**

Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian UNRAM

### ABSTRAK

Pasal 10 UU No.22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah menyatakan bahwa daerah berwenang mengelola sumberdaya alam di wilayah yurisdiksinya. Pengaturan yang lebih spesifik terdapat pada pasal 5 UU No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan daerah menyatakan penerimaan yang berasal dari sektor perikanan dibagi dengan proporsi 20 persen pemerintah pusat dan 80 persen untuk pemerintah daerah. Pemberlakuan undang-undang ini berarti menyediakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka pembangunan agromarin. Oleh karena itu identifikasi berbagai pilihan strategi untuk mengembangkan sektor ini sangat diperlukan.

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, sedangkan analisis data dengan mengkombinasikan teknik SWOT (*strength, weakness, opportunity, and threat*) dan AHP (*analytic hierarchy process*). Kesimpulan penelitian mengenai strategi kebijakan dikelompokkan kedalam dua level pengambilan keputusan. *Pertama* strategi pada tingkat perusahaan (industri) yaitu: (1) mengusahakan pasar baru, (2) menjaga pasar yang ada, (3) memperkuat organisasi, (4) mengadakan penelitian dan pengembangan secara kolaboratif, (5) memberi prioritas kepada tenaga kerja lokal. *Kedua* strategi pada tingkat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yaitu: (1) memperbaiki infrastruktur, (2) menghasilkan Perda yang konsisten dan kondusif, (3) mengundang investor baru, (4) memperluas akses informasi pasar, (5) menghasilkan tenaga kerja terampil, dan (6) meningkatkan alokasi kredit bagi industri agromarin.

### ABSTRACT

*As stated in article 10 of Act No.22/1999 on regional autonomy, regency governments have authorities in managing their natural resources available in their jurisdiction. Specifically article 5 of Act No. 25/1999 on financial balance argues that revenue generated from fishery sector are allocated as 20 percent for central government and 80 percent for provincial and regency governments.*

---

Kata kunci: Agromarin, strategi, Lombok

Key words: Agromarine, strategy, Lombok

*The enactment of these acts has provided opportunities for regency governments to optimally utilize marine and fishery resources in the context of agromarine development. Therefore identification of policy strategies to develop the sector is urgently needed.*

*Research was undertaken by utilizing descriptive method, while data analysis was accomplished by combining SWOT technique (strength, weakness, opportunity, and threat) and AHP (analytic hierarchy process). The research concludes that policy strategies that should be implemented are categorized into two broad levels. First, strategies at industry level, namely: (1) market penetration, (2) maintain existing market, (3) strengthening organization, (4) collaboration in research and development, and (5) provide more priority to local labors. Second, strategies at government level that are: (1) improving infrastructures, (2) producing conducive and consistent regulations, (3) inviting new investors, (4) enhancing access on market information, (5) providing skilled labors, (6) increasing credit allocation to agromarine activities.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang *Otonomi Daerah* pada pasal 10 mengamanatkan bahwa daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai pemanfaatan sumberdaya alam di daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 5, bahwa penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pembangunan umum dan sektor *perikanan* dibagi dengan keuntungan 20 persen untuk pemerintah pusat dan 80 persen untuk pemerintah daerah. Hal ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin mengingat Nusa Tenggara Barat memiliki sumberdaya kelautan (*marine resource*) yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dan sumberdaya manusia yang belum banyak diberdayakan.

Selama periode 1990-1999 jumlah penduduk yang menggantungkan diri pada perikanan pantai telah meningkat cukup drastis (44%) dan jumlah nelayan *full-time* juga mengalami peningkatan yang sangat tajam (46%). Selama periode tersebut jumlah rumahtangga dan pengusaha perikanan juga meningkat untuk semua jenis perahu penangkapan. Akibat dari tekanan eksploitasi tersebut adalah berlebihnya upaya penangkapan ikan (*over fishing*) yang pada gilirannya mengakibatkan rusaknya habitat ikan seperti hutan bakau dan terumbu karang. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya kelautan perlu

reorientasi fokus dari usaha yang bersifat ekstraktif menuju usaha budidaya (*marine culture*) yang lebih menjamin keberlanjutan usaha. Untuk mempercepat reorientasi tersebut maka diperlukan strategi yang terencana dan komprehensif bagi pengembangan usaha agromarin.

## METODE PENELITIAN

### Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif* untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi mengenai variabel, fenomena, menerangkan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, membuat prediksi serta memahami implikasi dari adanya hubungan tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *wawancara* terstruktur menggunakan gabungan antara daftar pertanyaan terbuka dan tertutup (*open ended* dan *close ended*).

### Penentuan Responden

Penentuan responden dilakukan secara *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang luas mengenai masalah yang diteliti. Jumlah responden ditetapkan secara *quota* sebanyak 10 orang yang mewakili seluruh *stakeholders* seperti investor dan calon investor, nelayan, pekerja pariwisata, dan pengusaha agromarin lainnya. Selain itu dilakukan wawancara dengan 5 informan kunci yang mewakili Akademisi, Perbankan, BKPM, Dinas PERINDAG, serta Dinas Perikanan dan Kelautan. Penentuan informan kunci ini juga dilakukan dengan *purposive sampling* dengan alasan yang sama. Dengan demikian jumlah responden seluruhnya adalah 15 orang.

### Data dan Sumber Data

*Data sekunder* diperoleh dari publikasi statistik maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga/instansi yang terkait dengan masalah perikanan dan kelautan. Data sekunder tersebut antara lain mencakup:

- (1) Kelayakan finansial yang ditunjukkan oleh nilai *Benefit Cost ratio* (BC ratio) dan *Internal Rate of Return* (IRR)
- (2) Nilai investasi kerang mutiara yang sudah terrealisir
- (3) Sumberdaya manusia yang tersedia dan terserap pada usaha kerang mutiara
- (4) Peluang ekspor manca negara

- (5) Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur investasi, terutama di sektor agromarin
- (6) Peluang pembiayaan dan permodalan

*Data Primer* diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur dengan responden dan informan kunci untuk mendapatkan informasi kuantitatif dan kualitatif.

### **Analisis Data**

Analisis data untuk menemukan strategi kebijakan pengembangan usaha agromarin dilakukan dengan teknik SWOT (yaitu analisis mengenai *kekuatan, kelemahan, peluang* dan *ancaman*) yang menggabungkan komponen matrik Evaluasi Faktor Internal (EFI) dengan Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) (David, F.R. 1997). Strategi tersebut dikelompokkan dalam dua kategori yaitu strategi yang akan dilakukan pada tingkat perusahaan dan strategi pada tingkat pemerintah baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

Oleh karena strategi tersebut bersifat komprehensif maka diperlukan urutan atau prioritas dalam pelaksanaannya. Untuk mendapatkan prioritas strategi tersebut maka analisis berikutnya dilakukan dengan teknik *Analytic Hierarchy Process* (AHP) (Gumbira-Sa'id, *et al.*, 1998).

Teknik *Analytic Hierarchy Process* (AHP) juga digunakan untuk mendapatkan prioritas dari masing-masing elemen pada matrik internal dan pada matrik eksternal. Alat analisis ini mengurai masalah yang kompleks menjadi elemen-elemen yang relatif sederhana, mengidentifikasi hubungan diantara elemen-elemen tersebut serta mendapatkan prioritas strategi kebijakan pengembangan dan peningkatan daya saing dalam rangka pengambilan keputusan (*decision making*). Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak komputer *Criterion Decision Plus/PC*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keragaan Usaha Agromarin di Pulau Lombok

#### Usaha Budidaya Kerang Mutiara

Usaha budidaya kerang mutiara di Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bidang usaha yang cukup diminati oleh investor. Keunggulan NTB sebagai daerah pusat pengembangan budidaya kerang mutiara dikarenakan oleh letak geografisnya yang berada pada zona batas pertemuan antara Samudra Pasifik dan Hindia, dimana perairan pada zona perbatasan ini menyebabkan kondisi fisik dan biologisnya relatif lebih stabil dan memberikan toleransi pada berbagai komoditas terhadap perubahan lingkungan. Bentuk pantai yang berteluk dan landai dengan kedalaman ideal serta ditumbuhi aneka jenis karang dan biota laut serta kondisinya yang belum tersentuh oleh pencemaran limbah industri memberikan keunggulan terhadap usaha-usaha budidaya dikawasan pantai.

Besarnya minat pengusaha terhadap investasi di bidang budidaya kerang mutiara ditunjukkan oleh besarnya investasi yang telah ditanamkan dalam usaha tersebut dan banyaknya perusahaan yang terlibat dalam usaha tersebut di berbagai daerah di NTB seperti tampak pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Perusahaan dan Besarnya Investasi Budidaya Kerang Mutiara

Kabupaten	Jumlah Perusahaan	Jumlah Investasi (Rp)
Lombok Barat	3	41,973,895,000
Lombok Tengah	1	8,200,000,000
Lombok Timur	3	21,113,905,000
Total	7	71,287,800,000

Sumber: Dinas Perikanan NTB, 2000

Dari data di atas tampak bahwa rata-rata nilai investasi budidaya kerang mutiara hingga tahun 1998 adalah 10.2 milyar rupiah. Jumlah perusahaan dan nilai investasi dibidang budidaya kerang mutiara ini diharapkan akan terus meningkat karena potensi usaha yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Besarnya usaha budidaya kerang mutiara juga dapat dilihat dari perkembangan luas areal budidaya dan produksi serta prospek pengembangannya di masa mendatang seperti disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Luas Areal dan Produksi Serta Potensi Perluasan Areal Budidaya Kerang Mutiara di Nusa Tenggara Barat Tahun 2000.

Kabupaten	Luas Areal Realisasi (Ha)	Luas Areal Potensial (Ha)	Produksi Biji Mutiara (kg)	Produksi Kerang Mutiara (Ton)
Lombok Barat	20	1,805	145	3.7
Lombok Tengah	5	705	9	0.4
Lombok Timur	25.47	2,355	65	4.1
Total	50.47	4,865	219	8.2

Sumber : Dinas Perikanan Dati I NTB, 2000.

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun pengembangan budidaya kerang mutiara sudah memenuhi areal yang cukup luas, namun jika dibandingkan dengan areal potensial yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten terlihat bahwa masih terdapat banyak peluang perluasan areal pemeliharaan. Dengan demikian maka produksi baik kerang mutiara maupun biji mutiara dapat lebih ditingkatkan lagi.

### **Usaha Budidaya Kerapu Bebek**

Berbeda dengan budidaya kerang mutiara yang sudah diusahakan cukup lama dan dilakukan secara intensif, budidaya kerapu bebek masih dalam taraf ujicoba yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah seperti Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di Batu Nampar, Lombok Timur, Dinas Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Barat di Teluk Ekas dan Bappeda Tk.I di pantai selatan Lombok Tengah. Budidaya yang dilakukan oleh BPTP baru memasuki musim pemeliharaan ke-2. Hasil produksi mencapai 152 kg, sedang uji coba oleh instansi lainnya sampai pada saat penelitian dilakukan, belum sampai pada masa panen.

Pemenuhan kebutuhan ekspor selama ini masih dilakukan melalui tangkapan alam yang bersifat fluktuatif, dan sangat jarang dapat dikirim secara hidup-hidup sehingga harganyapun jauh lebih rendah dari yang diharapkan.

### **Usaha Budidaya Lobster**

Sama halnya dengan budidaya kerapu bebek, budidaya udang lobster juga relatif baru dilakukan, pengusahannya dipelopori oleh BPTP di Desa Batu Nampar, dengan menggunakan sistem jala apung. Usaha budidaya udang lobster ini lebih cepat diadopsi oleh masyarakat umum,

terbukti sampai dengan akhir tahun 2001 petani nelayan pemelihara udang lobster ini sudah mencapai 64 orang. Hal ini dikarenakan bibit udang lobster relatif lebih mudah didapat, selain tersedia di pasar lokal, bibit juga bisa didapat dari menangkap sendiri di alam. Bahkan setelah usaha ini berjalan, bibit diperoleh dari udang alam yang banyak didapati menempel pada sisi luar jaring

Sebelum udang lobster ini dibudidayakan, pemenuhan pasar ekspor masih sangat tergantung pada hasil tangkapan alam. Namun berbeda dengan kerapu bebek yang sangat mudah mengalami kematian ketika ditangkap di alam, udang lobster relatif lebih tahan hidup, sehingga jumlah ekspornya pun lebih besar dibandingkan dengan ekspor kerapu bebek, namun keberhasilan penangkapan tersebut masih relatif kecil bila dibandingkan dengan banyaknya permintaan. Perkembangan hasil tangkapan udang lobster di Propinsi Nusa Tenggara Barat disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perkembangan Hasil Tangkapan Udang Lobster Alam menurut Kabupaten (Ton)

Kabupaten	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Lombok Barat	NA	NA	NA	NA	NA	NA*
Lombok Tengah	0.9	3.3	3.3	6.9	7.1	6.8
Lombok Timur	13.5	3.7	3.7	10	15.8	19.3
Total	14.4	7.0	7.0	16.9	22.9	26.1

Keterangan: NA= *Non Available*

Sumber : BPS Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2001.

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi udang lobster hasil tangkapan di alam bebas menunjukkan fluktuasi yang tidak tentu, hal ini mengindikasikan bahwa ekspor yang didasarkan atas hasil tangkapan di alam bebas tidak dapat memberikan kepastian pasokan seperti yang dikehendaki oleh konsumen.

Seperti halnya kerapu bebek, udang lobster diekspor terutama untuk memenuhi pasar Hongkong. Karena udang ini diminta dalam kondisi hidup, maka pengemasan yang menjamin kehidupan udang tersebut sangat penting. Cara yang digunakan dalam pengemasan adalah dengan jalan membuat tidur udang lobster dengan menurunkan suhu air secara perlahan dengan semprotan es, ketika udang sudah diam, kemudian diangkat dan dimandikan dengan serbuk gergaji kering dan dibungkus dengan koran sesuai dengan ukuran, yang berat badanya mencapai 500 gram dibungkus satu per satu, sedang yang beratnya 200 - 300 gram

dibungkus 2-3 ekor/bungkus. Setelah dibungkus udang kemudian dimasukkan kedalam kotak kemas stereofom berukuran 50 x 80 cm.

### Strategi Kebijakan Pengembangan Agromarin

Berdasarkan hasil *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan justifikasi *rating* dari masing-masing elemen maka matrik evaluasi faktor internal (IFE) disajikan pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Matrik Faktor Internal untuk Pengembangan Agromarin di Pulau Lombok

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor tertimbang
<b>Kekuatan (Strengths)</b>			
1. Sumberdaya Alam (SDA)	0.127	4	0.508
2. Internal Rate of Return (IRR) & BC ratio	0.235	3	0.705
3. Harga	0.087	3	0.261
<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>			
1. Kualitas sumberdaya manusia (SDM)	0.159	3	0.477
2. Akses pasar	0.118	1	0.118
3. Industri penunjang	0.069	1	0.069
4. Teknologi produksi	0.064	3	0.192
5. Penelitian dan pengembangan (Litbang)	0.059	2	0.118
6. Manajemen	0.082	3	0.246
Total	1.000		2.694

Dari Tabel di atas terlihat bahwa kekuatan utama dari usaha agromarin di Pulau Lombok adalah tingginya nilai Internal Rate of Return (IRR) dan Benefit Cost ratio (B/C ratio) dibandingkan dengan rata-rata IRR dan B/C ratio pada usaha ekonomi produktif lainnya. Selain itu, faktor dominan lainnya yang juga sangat menentukan kekuatan pengembangan agromarin adalah ketersediaan sumberdaya alam (SDA) yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dan tingkat harga produk yang masih tergolong kompetitif.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa kelemahan utama bagi pengembangan usaha agromarin di Pulau Lombok adalah terbatasnya Sumberdaya Manusia (SDM) terampil (*skilled labor*) yang berakibat pada rendahnya kemampuan manajemen dan penguasaan teknologi. Faktor lain yang membatasi pengembangan usaha agromarin adalah kekurangan

akses pasar dan kecilnya alokasi dana untuk penelitian dan pengembangan (*research and development*) serta ketersediaan industri penunjang yang masih sangat sedikit.

Selain ditentukan oleh faktor internal, pengembangan usaha agromarin juga ditentukan oleh faktor eksternal. Hasil evaluasi faktor eksternal (EFE) disajikan pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Matrik Faktor Eksternal Untuk Pengembangan Agromarin di Pulau Lombok

<b>Faktor Eksternal</b>	<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Skor tertimbang</b>
<b>Peluang pengembangan (Opportunities)</b>			
1. Kuantitas SDM	0.061	2	0.122
2. Permintaan luar negeri tinggi	0.109	3	0.327
3. Barang pengganti terbatas	0.061	1	0.061
4. Kesadaran kesehatan dan estetika meningkat	0.085	2	0.170
5. Kurs rupiah melemah	0.071	4	0.284
6. Realisasi investasi rendah	0.060	3	0.180
<b>Ancaman (Threats)</b>			
1. Daya beli masyarakat berkurang	0.062	3	0.186
2. Fluktuasi harga tinggi	0.062	2	0.124
3. Peraturan Daerah (Perda) yang membebani	0.091	3	0.273
4. Ketersediaan infrastruktur terbatas	0.060	3	0.180
5. Issue lingkungan meningkat	0.077	2	0.154
6. Kehadiran pemain baru	0.062	1	0.062
7. Fanatisme kedaerahan	0.073	3	0.219
8. Dukungan instansi teknis yang minimal	0.066	2	0.132
<b>Total</b>	<b>1.000</b>		<b>2.474</b>

Berdasarkan hasil evaluasi faktor eksternal seperti terlihat pada Tabel 5 di atas maka peluang utama yang harus dimanfaatkan untuk pengembangan usaha agromarin adalah tingginya permintaan luar negeri terhadap produk agromarin yang ditunjang oleh rendahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Kurs rupiah yang *undervalue* tersebut menyebabkan harga barang ekspor Indonesia pada umumnya

menjadi relatif murah. Faktor eksternal lainnya yang harus dimanfaatkan adalah masih terbukanya peluang investasi dibidang agromarin yang ditunjukkan oleh besarnya kesenjangan antara permohonan investasi dengan investasi yang direalisasikan (Dinas Perikanan NTB, 1999). Adanya kesenjangan ini menunjukkan bahwa potensi investasi agromarin di Pulau Lombok masih tersedia. Peluang pengembangan juga berasal dari semakin tingginya perhatian masyarakat, baik domestik maupun luar negeri, terhadap kesehatan dan nilai-nilai estetika. Sebagai sumber bahan makanan yang sangat kaya akan kandungan nutrisi dan sebagai bahan kecantikan dan kosmetik, produk-produk agromarin di Pulau Lombok memiliki peluang untuk dikembangkan lebih luas lagi.

Selain mengidentifikasi faktor yang memberi peluang pengembangan, Tabel 2 tersebut juga menyajikan faktor-faktor yang dapat mengancam upaya pengembangan bila sumberdaya tersebut tidak dapat dikelola dengan tepat dan benar. Ancaman terbesar adalah tendensi munculnya banyak Peraturan Daerah (Perda) yang lebih berorientasi jangka pendek untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) namun merupakan disinsentif bagi investor untuk menanamkan modal pada usaha agromarin. Bersamaan dengan itu adalah bangkitnya semangat primordialisme-kedaerahan yang menekankan pemanfaatan tenaga kerja lokal untuk mengisi peluang kerja.

Faktor eksternal lainnya adalah semakin rendahnya daya beli penduduk sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ekonomi juga menyebabkan pengembangan infrastruktur menjadi sangat terbatas terutama jalan raya dan listrik. Pada sisi lain kesadaran terhadap lingkungan yang lebih baik merupakan tantangan yang harus dihadapi. Bila faktor-faktor eksternal ini tidak dapat dikelola dengan baik maka bukan tidak mungkin investor akan mencari daerah lain sebagai tempat berusaha atau bahkan menyebabkan investor yang sudah ada akan memindahkan usahanya ke daerah lain.

Hasil evaluasi faktor internal (EFI) dan evaluasi faktor eksternal (EFE) kemudian dianalisis dengan teknik SWOT untuk menentukan strategi pengembangan dari usaha agromarin tersebut di Pulau Lombok. Hasil analisis SWOT di sajikan pada gambar 1 berikut:

<b>Kekuatan (Strength=S)</b>	<b>Kelemahan (Weaknesses=W)</b>

<b>Faktor Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDA</li> <li>2. IRR &amp; BC ratio</li> <li>3. Harga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM</li> <li>2. Akses pasar</li> <li>3. Industri penunjang</li> <li>4. Teknologi produksi</li> <li>5. Litbang</li> <li>6. Manajemen</li> </ol>
<b>Faktor Eksternal</b>		
<b>Peluang (Opportunity=O)</b>	<b>Strategi-SO</b>	<b>Strategi-WO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan SDM</li> <li>2. Permintaan Luar Negeri</li> <li>3. Barang Pengganti</li> <li>4. Kesadaran kesehatan dan estetika</li> <li>5. Kurs rupiah rendah</li> <li>6. Realisasi investasi rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertahankan peluang pasar yang ada, domestik dan luar negeri (S1, S2, S3, O1, O3, O5)</li> <li>2. Penetrasi pada pasar yang belum dimasuki (S1, S2, S3, O1, O2, O4, O5, O6)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan SDM trampil (W1, W4, W5, W6, O1, O6)</li> <li>2. Mengundang investor baru (W1, W3, O1, O2, O3, O5, O6)</li> <li>3. Perkuat organisasi (W1, W2, W3, W4, W5, W6, O2)</li> <li>4. Perbesar kredit untuk investasi agromarin (W2, W3, W4, W5, O2, O6)</li> </ol>
<b>Ancaman (Threat=T)</b>	<b>Strategi-ST</b>	<b>Strategi-WT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daya beli masyarakat berkurang</li> <li>2. Fluktuasi harga</li> <li>3. Perda yang membebani</li> <li>4. Ketersediaan infrastruktur</li> <li>5. Issue lingkungan</li> <li>6. Pemain baru</li> <li>7. Fanatisme kedaerahan</li> <li>8. Dukungan inst. teknis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsistensi peraturan (S2, S3, T3, T5, T7)</li> <li>2. Prioritaskan tenaga lokal (S2, S3, T7)</li> <li>3. Kembangkan infrastruktur (S1, S2, S3, T4, T8)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama litbang baik teknis maupun sosial (W1, W4, W5, T1, T5, T7)</li> <li>2. Perluas akses informasi (W2, W4, W5, T1, T2, T3, T5, T6, T8)</li> </ol>

Gambar 1. Analisis SWOT mengenai Strategi Pengembangan Agromarin di Pulau Lombok

Dari hasil analisis SWOT diperoleh berbagai strategi yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha agromarin di Pulau Lombok.

Strategi pengembangan dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) strategi kebijakan pengembangan yang dilakukan pada level industri (perusahaan) dan; (2) strategi kebijakan yang diambil pada tingkat pemerintah, baik pusat maupun daerah. Idealnya semua strategi kebijakan harus dilakukan secara simultan baik oleh perusahaan ataupun pemerintah. Namun demikian karena upaya secara serentak tersebut (*big push*) memerlukan biaya yang tidak sedikit maka strategi kebijakan disusun berdasarkan hirarki prioritas untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam setiap tahap pembuatan kebijakan.

### **Strategi Kebijakan pada Tingkat Industri (Perusahaan)**

#### ***Penetrasi pada pasar yang belum dimasuki***

Prioritas pertama dari strategi yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah penetrasi pasar yang belum dimasuki terutama dengan memperluas negara tujuan ekspor dengan memanfaatkan nilai tukar rupiah yang masih dibawah tingkat nilai tukar efektifnya. Selama ini negara tujuan ekspor masih terbatas pada Jepang, Amerika Serikat, dan Italia untuk ekspor mutiara; Belanda dan Denmark untuk ekspor rumput laut; serta Singapura untuk ekspor lobster.

#### ***Pertahankan peluang pasar yang ada, domestik dan luar negeri***

Walaupun harus melakukan penetrasi pasar yang belum dimasuki, industri agromarin juga harus tetap mempertahankan peluang pasar yang sudah ada baik domestik maupun internasional. Meskipun pasar domestik mengalami kelesuan sebagai akibat dari lemahnya daya beli masyarakat selama krisis ekonomi ini namun dalam jangka panjang pasar domestik tetap merupakan pasar yang potensial karena besarnya jumlah penduduk.

#### ***Perkuat organisasi***

Strategi kebijakan lainnya yang perlu dilakukan adalah memperkuat organisasi. Kelemahan mendasar para pengusaha agromarin, terutama yang dilakukan secara tradisional, adalah mereka kurang memiliki kemampuan mengorganisir diri sehingga tidak memiliki posisi tawar yang seimbang ketika harus menghadapi berbagai pihak diluar organisasinya seperti menghadapi pasar *oligopsony* dari asosiasi pedagang/eksportir. Lemahnya posisi tawar inilah yang menyebabkan petani ikan atau nelayan dalam posisi penerima harga, dan biasanya harga anjlok pada saat produksi tinggi/berhasil seperti yang sering dialami petani ikan atau nelayan. Seringkali harga jual tersebut, bahkan, di bawah biaya

produksinya. Organisasi juga diperlukan untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih kuat dengan para importir dari negara tujuan ekspor seperti yang dialami oleh petani udang windu yang produknya dihambat memasuki pasar Uni Eropa karena udang windu yang diekspor disinyalir mengandung *chlremphenicol*, sejenis antibiotik, yang melewati ambang toleransi.

### ***Kerjasama litbang baik teknis maupun sosial***

Strategi kebijakan lainnya adalah memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian untuk meningkatkan kemampuan *riset and development* (R&D) guna mencapai tingkat efisiensi usaha yang tinggi. Dalam kondisi perekonomian yang sangat kompetitif ini hanya perusahaan yang efisien saja yang dapat memenangi persaingan baik terhadap kompetitornya di dalam negeri maupun dengan eksportir dari negara lain.

### ***Prioritaskan tenaga lokal***

Akhirnya strategi yang juga perlu dipertimbangkan adalah menggunakan sebanyak mungkin tenaga kerja lokal sepanjang mereka memenuhi persyaratan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menjamin sustainability dari usaha agromarin tersebut karena salah satu syarat keberlanjutan usaha adalah bila masyarakat di sekitar tempat usaha dapat ikut merasakan manfaat dari usaha tersebut.

Rangkuman strategi yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan beserta skor prioritasnya disajikan pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Prioritas Strategi oleh Pengusaha untuk Mengembangkan Agromarin di Pulau Lombok

<b>Prioritas Strategi</b>	<b>Kode</b>	<b>Skor</b>
1. Penetrasi pada pasar yang belum dimasuki (S1, S2, S3, O1, O2, O4, O5, O6)	SO2	2.557
2. Pertahankan peluang pasar yang ada, domestik dan luar negeri (S1, S2, S3, O1, O3, O5)	SO1	1.941
3. Perkuat organisasi (W1, W2, W3, W4, W5, W6, O2)	WO3	1.547
4. Kerjasama litbang baik teknis maupun sosial (W1, W4, W5, T1, T5, T7)	WT1	1.346
5. Prioritaskan tenaga lokal (S2, S3, T7)	ST2	1.185

### **Strategi Kebijakan pada Tingkat Pemerintah**

Strategi kebijakan yang perlu dilakukan pada tingkat pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, disajikan pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Prioritas Strategi oleh Pemerintah untuk Mengembangkan Agromarin di Pulau Lombok

Prioritas Strategi	Kode	Skor
1. Kembangkan infrastruktur (S1, S2, S3, T4, T8)	ST3	1.786
2. Konsistensi peraturan (S2, S3, T3, T5, T7)	ST1	1.612
3. Mengundang investor baru (W1, W3, O1, O2, O3, O5, O6)	WO2	1.520
4. Perluas akses informasi (W2, W4, W5, T1, T2, T3, T5, T6, T8)	WT2	1.359
5. Penyediaan SDM trampil (W1, W4, W5, W6, O1, O6)	WO1	1.335
6. Perbesar alokasi kredit untuk usaha agromarin (W2, W3, W4, W5, O2, O6)	WO4	1.004

### Pengembangan Infrastruktur

Strategi kebijakan yang paling prioritas untuk dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang menjangkau lokasi usaha agromarin yang umumnya terletak jauh dari pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Hingga saat ini secara umum keadaan infrastruktur terutama jalan dan listrik di Pulau Lombok masih perlu ditingkatkan khususnya di daerah pesisir pantai yang belum dimanfaatkan untuk usaha agromarin. Selama periode krisis ekonomi, pertumbuhan investasi pada infrastruktur adalah negatif yang berarti penambahan investasi tersebut lebih kecil dari pada nilai penyusutannya. Hal ini berarti dalam lima tahun terakhir ini telah terjadi penurunan kualitas infrastruktur yang tersedia. Pengalaman dari berbagai negara dan daerah lain yang berhasil menarik investasi asing ataupun domestik menunjukkan bahwa para investor akan cepat menanamkan modalnya jika jaringan infrastruktur di lokasi-lokasi usaha potensial sudah tersedia dan berfungsi baik.

### **Konsistensi Peraturan Daerah**

Gejala yang umum dikeluhkan para pengusaha agromarin adalah banyaknya peraturan daerah yang pada intinya menyebabkan para pengusaha harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi berbagai pungutan. Akibat selanjutnya adalah meningkatnya biaya produksi yang pada akhirnya akan memperlemah daya saing produk agromarin dari Pulau Lombok baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Aspek lain dari banyaknya peraturan daerah adalah sering dijumpai peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yang mengatur investasi. Hal ini tentu saja akan menyebabkan iklim investasi menjadi kurang kondusif bagi para investor dan calon investor.

### **Mengundang investor baru**

Melihat masih banyaknya peluang investasi yang belum direalisasikan maka pemerintah daerah harus lebih proaktif mempromosikan sektor agromarin baik terhadap investor dalam negeri maupun investor asing. Potensi areal budidaya agromarin termasuk di Pulau Lombok masih belum seluruhnya dimanfaatkan secara ekonomis. Komoditas yang masih potensial untuk diusahakan antara lain: rumput laut, ikan kerapu, kepiting, mutiara, tripang, udang windu, dan lobster.

### **Perluas akses informasi**

Penyediaan informasi yang berkaitan dengan usaha agromarin antara lain meliputi lapangan usaha yang prospektif, lokasi budidaya, ketersediaan infrastruktur, potensi pasar baik untuk input maupun output. Informasi tersebut harus tersedia dengan mudah dan murah bagi setiap calon investor. Untuk itu penyediaan prospektus usaha untuk masing-masing komoditi harus tersedia.

### **Penyediaan SDM Terampil**

Keberhasilan suatu usaha termasuk usaha di bidang agromarin sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola usaha tersebut. Jumlah penduduk Pulau Lombok yang relatif berlimpah di satu sisi tidak diimbangi dengan kualitas keterampilan dibidang agromarin. Oleh karena itu untuk mendukung pengembangan usaha agromarin maka perlu diadakan lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga ahli baik madya maupun tinggi dibidang perikanan sehingga dapat mengelola sumberdaya pantai dan pesisir dengan efisien.

### **Perbesar Alokasi Kredit untuk Usaha Agromarin**

Sebagai suatu kegiatan investasi maka kredit memainkan peran yang sangat penting bagi kelangsungan usaha. Kegiatan investasi melibatkan aliran dana yang cukup besar dalam waktu yang lama (*multi-years*). Namun seperti usaha di sektor pertanian pada umumnya, usaha dibidang agromarin belum banyak menerima alokasi kredit baik dari pemerintah maupun dari perbankan umum. Hal ini dikarenakan masih kuatnya persepsi di masyarakat bahwa usaha agromarin sangat penuh dengan resiko dan ketidakpastian sehingga kurang diminati oleh perbankan dalam mengalokasikan kredit. Oleh karena itu untuk membantu pengembangan usaha agromarin maka diperlukan intervensi pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal ataupun moneter untuk mendukung pengembangan usaha agromarin. Instrumen seperti *selective credit control* dapat digunakan untuk mempercepat pengembangan usaha agromarin di Pulau Lombok.

### **KESIMPULAN**

Strategi kebijakan pengembangan agromarin di Pulau Lombok berdasarkan tingkatan pengambil keputusan dan urutan prioritasnya adalah:

1. Strategi kebijakan pada tingkat perusahaan/industri yaitu: (1) mengusahakan pasar baru, (2) menjaga pasar yang ada, (3) memperkuat organisasi, (4) mengadakan penelitian dan pengembangan secara kolaboratif, (5) memberi prioritas kepada tenaga kerja lokal.
2. Strategi kebijakan pada tingkat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yaitu: (1) memperbaiki infrastruktur, (2) menghasilkan Perda yang konsisten dan kondusif, (3) mengundang investor baru, (4) memperluas akses mengenai informasi pasar, (5) menghasilkan tenaga kerja terampil, dan (6) meningkatkan alokasi kredit bagi industri agromarin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- BPS Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2001. Nusa Tenggara Barat dalam Angka.
- David, F.R. 1997. Strategic Management. Six edition, Prentice Hall International. New Jersey.
- Dinas Perikanan NTB. 1999. Buku Tahunan Statistik Perikanan. Dinas Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

- , 2000. Buku Tahunan Statistik Perikanan. Dinas Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- , 2001. Buku Tahunan Statistik Perikanan. Dinas Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Gumbira Sa'id, E., Nanda Sandaya dan Jeroen Nijsen, 1998. Strategy Formulation to Improve Indonesian Tuna Competitiveness. Jurnal Agribisnis. (2) No. 2. Jember